



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian aspirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P. /Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia C. Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa Bali D. Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN) E. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia F. Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia G. Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia H. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara I. Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali J. Ketua Forum Penyuluh Nusantara K. Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia, Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa Bali, Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia, Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara, Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali, Ketua Forum Penyuluh Nusantara, dan Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali, dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN, pada hari Rabu, 19 Juni 2024, dibuka pukul 10.26 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia, Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa Bali, Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia, Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara, Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali, Ketua Forum Penyuluh Nusantara, dan Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali, dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN, sebagai berikut:

1. Masih banyak tenaga honorer yang tidak masuk pendataan BKN pada tahun 2022. Padahal tenaga honorer tersebut sudah mengabdikan selama 15-20 tahun.
2. Tenaga honorer yang terdata di BKN sumber gajinya berasal dari APBD. Sementara tenaga honorer yang tidak terdata di BKN sumber gajinya berasal dari BLUD.
3. Terdapat beberapa jenis jabatan yang tidak mendapatkan alokasi formasi pada pengadaan CASN tahun 2024 sebagaimana Keputusan Menteri PANRB No. 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, antara lain:
 - a. Tenaga kependidikan (operator sekolah, penjaga sekolah, pustakawan sekolah, dll);

- b. Penyuluh Bahasa Bali
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana
 - d. Guru agama Kristen
4. Guru agama Kristen belum mendapatkan formasi sejak penerimaan CASN tahun 2021-2023. Tahun 2024 pemerintah daerah juga tidak mengusulkan formasi untuk guru agama Kristen sehingga kebutuhan guru agama Kristen dipenuhi oleh volunteer yang tidak mendapatkan gaji. Hal ini terjadi di berbagai daerah seperti: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan lain-lain.
 5. Jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, dan pengamanan dalam dapat diangkat menjadi PPPK bukan dialihkan menjadi tenaga alih daya (*outsourcing*).
 6. Peraturan turunan UU ASN belum ada sampai saat ini, sementara waktu penataan tinggal 3 bulan lagi hingga Desember 2024.
 7. Tuntaskan permasalahan guru yang telah lulus tes pada tahun 2021-2023 tetapi belum mendapatkan Surat Keputusan (SK).
 8. Seragam antara PNS dan PPPK jangan dibeda-bedakan.
 9. Jenjang karir yang jelas bagi guru PPPK karena sudah banyak juga yang lulusan S2 (tidak berhenti karirnya di golongan 9).
 10. Tidak ada minimal kontrak PPPK per 5 tahun, akan tetapi perpanjangan terus menerus sampai usia pensiun.
 11. Alokasi formasi untuk guru Bahasa Jepang yang sangat minim pada pengadaan CASN padahal keberadaannya sangat dibutuhkan bagi Provinsi Bali.
 12. Terdapat 690 orang bidan yang sudah lulus tes tahun 2023 tetapi sampai saat ini belum mendapatkan SK.

Para tenaga honorer menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI sebagai berikut:

1. Memastikan peraturan turunan UU ASN segera diterbitkan mengingat batas waktu penataan tenaga non ASN hanya 3 bulan lagi hingga Desember 2024.

2. Tenaga honorer yang terdata dalam aplikasi BKN maupun yang tidak terdata dapat diangkat menjadi PPPK.
3. Memberikan alokasi formasi pada pengadaan CASN tahun 2024 untuk jabatan tenaga kependidikan, penyuluh Bahasa Bali, penyuluh KB, guru Bahasa Jepang, dan guru agama Kristen.
4. Menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sudah lulus tes namun belum mendapatkan formasi serta menerbitkan SK.
5. Memberikan kesempatan yang sama bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan pengamanan dalam untuk dapat diangkat menjadi PPPK.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia, Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa Bali, Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia, Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara, Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali, Ketua Forum Penyuluh Nusantara, dan Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali, dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN, sebagai berikut:

1. Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Yang bisa dijamin Kementerian PANRB terkait pengangkatan hanya data 2.3 juta yang ada dalam pendataan BKN. Banyak tenaga honorer yang belum terdata jumlahnya mungkin sebanyak 3 juta orang. Ada 2 tahapan, pertama menyelesaikan THKII yang 2.3 juta. Lalu menyelesaikan tenaga honorer yang belum terdata.
 - b. Ada temuan yang bukan tenaga honorer, masuk dalam pendataan honorer di BKN.
 - c. Mudah-mudahan tenaga honorer yang hadir dinaikkan derajatnya dan kesejahteraannya. Tenaga honorer yang masuk pendataan maupun yang belum, akan segera dituntaskan pengangkatannya. Cara pandang penataan pemerintah tentu berbeda, tapi dalam rapat anggaran sudah ada angka yang dialokasikan untuk penanganan tenaga honorer. Bidan profesi dan bidan Pendidikan berbeda cara pandang. Tetapi secara faktual mereka bekerja menolong persalinan.
 - d. Penyuluh Bahasa Bali tidak masuk dalam formasi CASN tahun 2023 kemarin.
 - e. Mengingat amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum, setiap orang berhak mendapat pekerjaan yang layak. Dengan

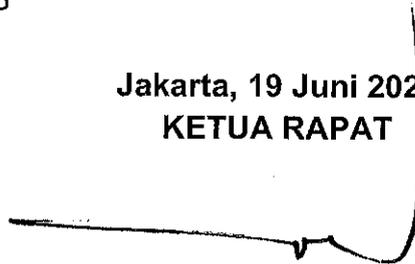
mengingat UU ASN pasal 66 harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Apakah peraturan termasuk perda bertentangan dengan aturan di atasnya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya, pada tahun 2022 keluar surat edaran dirjen untuk teknis menjadi ASN. Dbolehkan yang penting mereka bekerja di mana bukan ijazahnya. Tapi tahun 2023 ketika keluar surat edaran dirjen. Terdapat 690 orang yang sudah lulus tes 2023 tetapi SK belum keluar. Bagaimana database bidan akan disampaikan ke Komisi II DPR RI. Saya mengindikasikan adanya cacat hukum keluarnya surat edaran dirjen Kesehatan. Dukungan mereka yang sudah lulus diangkat menjadi PPPK. Kalau yang sudah lulus saja belum diangkat apalagi yang baru terdata.

2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan seluruh aspirasi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian/Lembaga terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.07 WIB

Jakarta, 19 Juni 2024
KETUA RAPAT



Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
A-142